

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang, terutama sejak terhampas dengan pukulan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997. Kemiskinan sering kali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan, semata-mata kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multi dimensi yang tidak mencakup aspek ekonomi saja akan tetapi juga dimensi sosial budaya dan dimensi struktur atau politik. Kemiskinan juga merupakan salah satu masalah yang memiliki beban cukup berat dalam pembangunan yang ditandai dengan kerentanan, ketidak berdayaan, keterisolasian serta ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Beberapa upaya dari pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan telah dilakukan, tetapi hasilnya tidak begitu menunjukkan perubahan yang signifikan.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat dalam jangka waktu cukup lama dapat memengaruhi perkembangan dan kemajuan masyarakat tersebut untuk masa-masa berikutnya. Susanto dalam Soetomo (2009:112) menyatakan, "Kondisi kemiskinan yang dialami suatu masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan terbentuknya suatu budaya kemiskinan sebagai suatu sub budaya".

Meskipun kemiskinan telah menjadi subjek penelitian ilmiah sejak lama dengan tema atau label yang beraneka ragam, akan tetapi apabila di

telaah lebih lanjut sebagian besar penelitian tentang kemiskinan yang dilakukan secara ilmiah lebih banyak ditekankan pada pemahaman. Sedangkan komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan masih jarang dilakukan meskipun banyak kebijaksanaan dalam menanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan.

Pembangunan nasional merupakan suatu konsep penanggulangan sebagai proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah secara normatif bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun tidak menunjukkan hasil yang cukup berarti, karena masih banyak terdapat masyarakat dengan status keluarga pra sejahtera (belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal) dan sejahtera I (telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya).

Kegagalan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan negara-negara berkembang dikarenakan kurang memperhatikan partisipasi masyarakat. Yaitu mengikut sertakan masyarakat dalam tiga tahapan kegiatan: 1) Perencanaan program, 2) Pelaksanaan program, dan 3) Penelitian program (Nainggolan, 2010: 89). Padahal masalah kemiskinan merupakan masalah sumberdaya manusianya, baik yang belum berkembang maupun yang belum dimanfaatkan secara optimal

(Tjiptoherijanto 1997: 78). Upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya dan politik merupakan hakekat utama dalam penanggulangan kemiskinan. Kemampuan masyarakat (sumber daya manusia) untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengendalikan kemampuan yang dimilikinya sehingga pemberdayaan merupakan jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat miskin yang belum dilibatkan dalam pemberdayaan manusia sebagai pengentasan kemiskinan.

Beberapa langkah konkrit yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dijabarkan dalam berbagai program berbagai program yang diharapkan menjadi instrumen utama kegiatan tersebut. Berbagai program yang dilaksanakan diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MANDIRI), Program Keluarga Harapan (PKH), program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dan lain-lain (hasil penelitian kemiskinan oleh Maimun Saleh). Salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melalui pendekatan pemberdayaan keluarga yang mengacu pada Undang-Undang 52 Tahun 2009, merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang pelaksanaannya diatur dalam Inpres

No. 3 Tahun 1996 tentang pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BKKBN pada tahap Keluarga Sejahtera maka jumlah penduduk Desa Sambirejo Timur 6406 jiwa, yang tergolong penduduk Pra Sejahtera 17 jiwa, dan yang tergolong penduduk Sejahtera I berjumlah 1257 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa sebahagian masyarakat, masih hidup dalam kemiskinan dan belum dapat ikut serta menikmati hasil-hasil pembangunan.

Faktor permasalahan yang dihadapi didalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melur industri rumah tangga di Dusun III Melur Kecamatan Percut Sei Tuan adalah masalah permodalan, waktu pelatihan dan juga pemasaran hasil industri rumah tangga. Modal yang didapatkan hanya dari ketua kelompok dan bantuan yang diberikan BKKBN Percut Sei Tuan. Masalah waktu juga menjadi permasalahan di dalam kelompok ini, dikarenakan masih banyak anggota kelompok yang belum bisa membagi waktu untuk mengikuti program dan membagi waktu untuk mengurus rumah tangga. Pemasaran produk yang dihasilkan juga menjadi permasalahan dalam kelompok industri rumah tangga ini. Keterbatasan tempat menampung hasil industri rumah tangga masih tergolong minim dan kurang luas. Pemasaran hasil industri rumah tangga hanya dilakukan dengan mengikuti pameran-pameran yang diikuti kelompok UPPKS Melur ini.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun 2014, maka penduduk kecamatan Percut Sei Tuan berjumlah 26.243 jiwa, yang bermata pencaharian sebagai buruh 7.456 orang, jumlah penduduk dengan usia pekerja (17-59 tahun) 5.123 jiwa. (Badan Pusat Statistik, 2014).

Pendapatan keluarga tidak terpenuhi karena umumnya kepala keluarga bekerja sebagai pedagang kaki lima, bekerja serabutan dan terkadang sering sekali tidak bekerja atau pengangguran. Pendapatan dalam sehari sebesar Rp.30.000,00-Rp.50.000,00, dan memaksa para ibu-ibu rumah tangga juga harus turut membantu perekonomian keluarganya. Di desa Sambirejo Timur Dusun III Melur Kecamatan Percut Sei Tuan ini telah berdiri sebuah kelompok industri rumah tangga yaitu kelompok KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Melur. Kelompok ini bertujuan untuk mengangkat perekonomian anggotanya dengan memberikan beberapa pelatihan diantaranya pelatihan membordir dan membuat beberapa jenis makanan ringan, yang diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat mengangkat perekonomian anggota KUBE Melur.

Dalam Inpres No.3 Tahun 1996 tentang pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan menekankan perlunya usaha terpadu dan menyeluruh yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kemampuan pada keluarga terutama keluarga yang masih dalam tahap Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS1), agar dapat diberdayakan melalui usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatannya dalam suatu wadah yang disebut kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Dan Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Kegiatan UPPKS yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN), antara lain; (1) UPPKS bidang industri rumah tangga, yaitu usaha sendiri bukan anak perusahaan dari bentuk usaha perseorangan, (2) UPPKS bidang usaha jasa, yang bergerak dalam pelayanan, (3) UPPKS bidang usaha perdagangan, yang dilakukan dengan jual beli, serta UPPKS bidang pertanian, yang kegiatannya mengolah alam (Stigma Volum XIII No. 4 Tahun 2005).

Program keluarga berencana nasional tidak hanya menjalankan program Keluarga Berencana (KB) guna mengatasi ledakan penduduk saja, namun juga menyelenggarakan program lain seperti kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan keluarga serta program penguatan keluarga kecil berkualitas melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) merupakan program yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan program KB, dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga yang salah satunya melalui kegiatan industri rumah tangga. Industri rumah tangga berfungsi sebagai wadah pembinaan, pengembangan, dan pengorganisasian usaha-usaha ekonomi produktif. Kegiatan industri rumah tangga ini merupakan kegiatan pendukung program KB yang anggotanya terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dalam rangka peningkatan

kesejahteraan keluarga melalui kegiatan wirausaha. Kelompok yang dirintis oleh BKKBN pada tahun 1976 ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga peserta KB agar kehidupannya menjadi lebih sejahtera. Salah satu hal yang mendasarinya adalah bahwa tanpa kondisi yang baik, mustahil keluarga akan dapat meningkatkan kesejahteraannya, dan ini harus dimulai dari memberdayakan keluarga dibidang ekonomi.

Upaya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga terhadap keluarga Pra S dan KS I harus tetap diprioritaskan mengingat jumlahnya yang masih cukup banyak. Keluarga ini sangat rentan terhadap masalah-masalah ekonomi dan sosial. Sehingga sangat mungkin terjadi penurunan status kesejahteraan setiap saat. Tentunya keadaan ekonomi yang serba kekurangan akan menimbulkan dampak negatif bagi keluarga itu sendiri dan juga masyarakat. Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi keluarga, maka BKKBN membuat suatu program yang memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui berwirausaha sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera dengan terbentuknya program UPPKS.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melur Di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan (Studi Pada Industri Rumah Tangga)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk menentukan masalah yang akan dirumuskan dan dipilih, maka terlebih dahulu mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk memfokuskan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah selama ini kurang memperhatikan partisipasi masyarakat.
2. Masih banyak jumlah masyarakat yang tergolong dalam keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.
3. Masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya
4. Masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti program UPPKS di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian, maka masalah penelitian ini dibatasi pada Pengaruh Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melur di Desa Sambirejo Timur Dusun III Melur Kecamatan Percut Sei Tuan (Studi Pada Industri Rumah Tangga).

1.4 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah suatu problematika penelitian dan merupakan bagian pokok dari kegiatan penelitian Pengaruh Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terhadap

Kesejahteraan Keluarga Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melur di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan (Studi Pada Industri Rumah Tangga) yang dituangkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Seberapa baik program UPPKS di Desa Sambirejo Timur Dusun III Melur Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Seberapa besar pengaruh program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) terhadap kesejahteraan keluarga Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melur di Desa Sambirejo Timur Dusun III Melur Kecamatan Percut Sei Tuan?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang telah dirumuskan untuk mendeskripsikannya, menganalisis dan menginterpretasikan fokus penelitian. Sehingga tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program UPPKS di Desa Sambirejo Timur Dusun III Melur Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Untuk mengetahui pengaruh program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UPPKS) terhadap kesejahteraan keluarga Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melur di Desa Sambirejo Timur Dusun III Melur Kecamatan Percut Sei Tuan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi peserta yang belum, sedang maupun purna KB untuk mengetahui pentingnya program UPPKS dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga KUBE melur.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan masukan kepada jurusan Pendidikan Luar Sekolah, kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.

- b. Sebagai sambungan dan bahan acuan bagi peneliti lain jika ingin melakukan atau pengembangan lebih lanjut mengenai pengaruh program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) terhadap kesejahteraan keluarga KUBE melur di Desa Sambirejo Timur Dusun III Melur Kecamatan Percut Sei Tuan.

THE
Character Building
UNIVERSITY